



Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengoptimalan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Buleleng

Kadek Dwi Paramita ^{1*}, Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi ² 

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

dwi.paramita@undiksha.ac.id ^{1*}, ayu.wulan@undiksha.ac.id ², nikadeksinarwati@undiksha.ac.id ³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kompetensi aparat pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling* dengan 116 responden di pemerintah desa Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk kuesioner. Analisis yang digunakan ialah analisis regresi berganda dengan menggunakan IBM SPSS (*Statistical Program for Social Science*) versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa.

Keywords: Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengoptimalan Pengelolaan Dana Desa.

Abstract

This study aims to determine the effect of village fund management officers, community participation and the use of information technology to optimizing village fund management of Buleleng Regency. This study used a purposive sampling method with 116 respondents at the village government of Buleleng Regency. The data collection technique in this study is a questionnaire. The analysis used is multiple regression analysis using SPSS (Statistical Program for Social Science) version 26. The results of this study indicate the village fund management officers, community participation and the use of technology had a positive and significant effect to optimizing village fund management.

Keywords: *village fund management officers, community participation, the use of information technology, optimizing village fund management.*

Pendahuluan

Desa merupakan lingkup wilayah terkecil dari suatu negara yang tumbuh dan berkembang serta tidak dapat dipisahkan dari tatanan kehidupan negara Indonesia. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam menciptakan iklim tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan yang dilakukan melalui pembangunan, pengarahan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Desa menjadi tumpuan dan harapan serta tulang punggung dalam pelaksanaan pembangunan nasional, diprioritaskan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintah. Kewenangan desa untuk mengelola dan menjalankan pemerintahannya sendiri disebut desentralisasi.

Buleleng merupakan Kabupaten terluas di Bali yang menerima dana desa terbesar di Bali pada tahun 2019 yakni Rp 630.189.586.000, Buleleng terdiri atas 9 Kecamatan dan 129 Desa. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kabupaten Buleleng juga menerima Alokasi Dana Khusus Fisik yang paling banyak di Bali yakni sebesar

Rp 110.145.526.000 (DJPK, 2019). Dana desa yang besar ini memicu kekhawatiran bagi pemerintah terutama kesiapan desa mengelola dana desa yang dialokasikan.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 2 menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya asas-asas tersebut pemerintah desa diharapkan dapat transparan dalam pelaporan anggaran, bertanggungjawab dengan pelaporan keuangannya, mengikutsertakan masyarakat dalam pembentukan laporan keuangan serta tertib dan disiplin dalam penggunaan anggaran. prinsip pengelolaan ini perlu dijadikan pedoman dalam mengelola dana desa agar dapat digunakan secara efektif dan efisien sehingga dana dapat dikelola secara optimal. Secara efektif artinya pengelolaan keuangan desa tersebut dapat mencapai tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Secara efisien artinya pengelolaan keuangan dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran (Alauddin, 2020). (Agustinawati, 2014) menyebutkan pengelolaan dana desa dapat dikatakan optimal apabila sudah dimanfaatkan untuk pembangunan desa secara efektif, efisien dan akuntabel.

Kekhawatiran ini telah terbukti dengan temuan DPMD Buleleng tahun 2019 mengenai 29 desa di Kabupaten Buleleng terancam tidak dapat mencairkan dana desa tahap III, hal ini dikarenakan 29 desa tersebut belum menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban dana desa tahap I dan II, serta tidak memenuhi persyaratan terkait laporan realisasi anggaran dana desa tahap I dan tahap II minimal 75% dan capaian output (fisik) harus melewati 50% (News, 2019). Hal ini tentu mengindikasikan bahwa pengelolaan dana desa belum dilaksanakan secara optimal, pasalnya pengelolaan dana desa dapat dikatakan optimal apabila sudah dimanfaatkan untuk pembangunan desa secara efektif, efisien, dan akuntabel (Agustinawati, 2014).

Desa yang terancam tidak dapat mencairkan dana desa tahap III tersebut antara lain Kecamatan Busungbiu meliputi; Desa Kedis, Desa Kekeran, dan Desa Sepang Kelod. Kecamatan Banjar meliputi; Desa Tirta Sari dan Desa Tegeha. Kecamatan Seririt meliputi; Desa Ularan, Desa Tangguwisia, Desa Pengastulan, Desa Bubunan, dan Desa Umeanyar. Kecamatan Gerokgak meliputi; Desa Pemuteran, Desa Penyambangan, Desa Musi, Desa Sanggalangit dan Desa Celukan Bawang. Kecamatan Kubutambahan meliputi; Desa Tunjung dan Desa Tamblang. Kecamatan Tejakula terdapat satu desa yakni Desa Tembok. Kecamatan Buleleng meliputi; Desa Anturan, Desa Sari Mekar, Desa Poh Bergong, Desa Petandakan dan Desa Penglatan. Kecamatan Sukasada meliputi; Desa Pegayaman, Desa Selat dan Desa Kayu Putih. Kecamatan Sawan meliputi; Desa Giri Emas, Desa Galungan dan Desa Bebetin (News, 2019).

Keterlambatan pelaporan pertanggung jawaban dana desa menghambat pencairan dana desa untuk tahap selanjutnya, hal ini mengandung makna jika desa mengalami kesulitan dalam penyusunan APB Desa atau laporan keuangan, maka secara otomatis desa akan terhambat dalam pencairan dananya dan berimplikasi terhadap kemampuan daya serap dana desa (Najiyati et al., 2016). Hal ini juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya, sehingga apabila terjadi keterlambatan pelaporan pertanggung jawaban, hal ini menandakan belum terpenuhinya asas akuntabilitas sehingga pengelolaan belum terlaksana secara optimal.

Faktor pertama yang mungkin memengaruhi pengoptimalan pengelolaan dana desa ialah kompetensi aparat pengelola dana desa. Pemerintah menegaskan bahwa rendahnya penyerapan dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) karena desa masih kurang paham dalam menyusun anggaran desa sesuai persyaratannya (Danisari, 2018). Keberhasilan pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh kompetensi aparat pengelola dana desa, dalam hal ini kompetensi dari aparat desa berperan penting agar dana desa dapat terserap dengan baik khususnya kompetensi dari kepala desa itu sendiri. Berpedoman pada program Nawa Cita ke-3 yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa sehingga diperlukan pengelolaan dana desa yang baik dari pemerintah desa dengan dukungan aparatur

desa yang berkualitas serta berkompeten di bidangnya, terutama kepala desa. Kepala desa sebagai penanggung jawab di desa harus memiliki wawasan serta pengalaman yang baik di bidangnya.

Pada hubungan kompetensi aparat pengelola dana desa terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa, peneliti mengacu pada hasil penelitian terdahulu dari Umaira & Adnan (2019), Alauddin (2020), Fajri et al. (2021), Giriani et al. (2021), Ariyani (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H1: Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pengoptimalan Pengelolaan Dana Desa.

Faktor kedua yang memengaruhi pengoptimalan pengelolaan dana desa ialah partisipasi masyarakat. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 menyatakan jika segala kegiatan yang berhubungan dengan desa terutama pembangunan serta pemberdayaan masyarakat sangat penting adanya keterlibatan masyarakat sebagai bentuk pengakuan terhadap otonomi asli desa. Untuk mencapai pengoptimalan pengelolaan dana desa serta agar dana yang digelontorkan menjadi tepat sasaran, maka masyarakat desa harus ikut serta berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Keterlibatan masyarakat yakni keikutsertaan masyarakat baik dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, keikutsertaan dalam pemilihan dan pengambilan keputusan, serta mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri, begitu pula dalam hal pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat penting agar penggunaan dan pengelolaannya lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih mengena dengan kepentingan nyata dari pemerintah (Mentari Tumbel, 2017).

Pada hubungan partisipasi masyarakat terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa, peneliti mengacu pada hasil penelitian dari Rismawati (2019), Umaira & Adnan (2019), Pahlawan et al. (2020), Giriani et al. (2021) dan Alauddin (2020) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H2: Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pengoptimalan Pengelolaan Dana Desa.

Hal lain yang memengaruhi pengoptimalan pengelolaan dana desa ialah pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data termasuk memproses, mendapatkan,, menyusun, menyimpan dan memanipulasi data (Karyadi, 2018). Aparatur desa harus mampu mengoperasikan teknologi informasi untuk mempermudah dan melancarkan pekerjaannya. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat mampu memberikan dampak positif seperti meningkatkan kinerja di berbagai kegiatan dengan cepat, tepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi informasi juga diperlukan dalam proses pelaporan keuangan dana desa, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Pada hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa , peneliti mnegacu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan et al. (2020), Sapartiningsih et al. (2018), Andika & Wati (2021), Saputra (2020) dan Rismawati (2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H3: Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pengoptimalan Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan pemaparan diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa, (2) untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa, dan (3) untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kompetensi aparat pengelola dana desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi. Sedangkan variabel terikatnya dalam penelitian ini adalah pengoptimalan pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah dengan menggunakan instrument yang berbentuk kuesioner yang disebarakan kepada responden. Skala yang digunakan dalam penyusunan kuesioner adalah skala *likert*.

Penelitian ini dilakukan di kantor desa se-Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang hasilnya didapat dari responden melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian ini ialah 129 desa yang ada di Kabupaten Buleleng. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik *Purposive Sampling*, yakni penentuan sampe menggunakan pertimbangan tertentu. Hal yang diperhatikan dalam pemilihan sampel ini terfokus pada desa yang mengalami keterlambatan pelaporan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa dan Desa yang Laporan Realisasi Anggaran dengan capaian outputnya belum melewati 50%. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 29 desa sebagai sampel.

Adapun analisis data yang digunakan yakni (1) analisis deskriptif, (2) uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, (3) uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, (4) uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi berganda, uji parsial (uji t), dan uji determinasi (R^2).

Hasil dan Pembahasan

Kuesioner yang disebarakan kepada responden sebanyak 116 kuesioner dan tingkat pengembalian kuesioner sebesar 100%. Merujuk pada hasil statistic deskriptif variabel kompetensi aparat pengelola dana desa mendapat nilai terendah sebesar 24 dan nilai tertinggi sebesar 30 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 27,12 yang berarti kompetensi aparat pengelola dana desa cenderung tinggi baik dari segi pendidikan, kemampuan dan sikap (*attitude*) dengan standar deviasi 1,875. Variabel partisipasi masyarakat nilai terendah (*minimum*) sebesar 20 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 25 dengan nilai rata-rata sebesar 22,31 yang berarti partisipasi masyarakat sudah terlaksana dengan baik dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan program desa dengan standar deviasi 1,810. Sedangkan untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi mendapat nilai terendah sebesar 21 dan nilai tertinggi sebesar 30 dengan nilai rata-rata 27,82 yang berarti responden telah memanfaatkan teknologi dengan baik dalam penyusunan pelaporan anggaran dana desa dan nilai standar deviasinya sebesar 2,129. Untuk variabel pengoptimalan pengelolaan dana desa mendapat nilai terendah sebesar 34 dan nilai tertinggi sebesar 45 dengan nilai rata-rata sebesar 39,70 yang berarti pengoptimalan pengelolaan dana desa sudah terlaksana dengan baik dalam hal penyusunan anggaran hingga pelaporan penggunaan anggaran dengan standar deviasi 3,276. Hasil uji statistic deskriptif disajikan dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
X1	116	24	30	27,12	1,875
X2	116	20	25	22,31	1,810
X3	116	21	30	27,82	2,129
Y	116	34	45	39,70	3,276
Valid N (listwise)	116				

(Sumber : data diolah, 2022)

Uji validitas bertujuan untuk menguji tingkat keandalan data, suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011) dalam (Alauddin, 2020). Uji validitas bisa diketahui dengan melihat r_{hitung} (Pearson Correlation). Apabila $Pearson Correlation > r_{tabel}$ (pada taraf signifikansi 5%), maka dapat dikatakan setiap item kuesioner valid. Berdasarkan hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan memiliki nilai $Sig. (2-tailed) < 0,05$ sehingga dapat ditarik kesimpulan seluruh item pernyataan untuk setiap variabel dinyatakan valid.

Uji reliabilitas pengumpulan data dalam penelitian ini diukur berdasarkan nilai $Cronbach's Alpha > 0,70$ maka variabel dinyatakan reliabel (Ghozali, 2013) dalam (Ariyani, 2020). Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai $Cronbach's Alpha > 0,70$. Sehingga dapat ditarik kesimpulan seluruh instrument penelitian reliabel.

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan metode *One Sample Kolmogorov Smirnov (K-S) Test*. Hasil uji normalitas akan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		116
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.36332457
Most Extreme Differences	Absolute	.048
	Positive	.043
	Negative	-.048
Test Statistic		.048
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

(Sumber : data

diolah, 2022)

Berdasarkan dapat dilihat bahwa

tabel diatas, nilai

Kolmogorov Smirnov (K-S) sebesar 0,200 dengan nilai signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa residual data terdistribusi normal.

Uji multikolinearitas, bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variabel independent pada model regresi. Pada uji ini dilakukan dengan mengamati nilai *Tolerance* dan VIF, apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2009) dalam (Ariyani, 2020). Hasil uji multikolinearits disajikan pada tabel berikut

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.141	4.143		.517	.606		
X1	.258	.124	.148	2.077	.040	.916	1.091
X2	.886	.138	.489	6.419	.000	.799	1.252
X3	.388	.116	.252	3.354	.001	.824	1.214

(Sumber : data diolah, 2022)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai *Kolmogorov Smirnov* (K-S) sebesar 0,200 dengan nilai signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa residual data terdistribusi normal.

Uji multikolinearitas, bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variabel independent pada model regresi. Pada uji ini dilakukan dengan mengamati nilai *Tolerance* dan VIF, apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2009) dalam (Ariyani, 2020). Hasil uji multikolinearits disajikan pada tabel berikut

Berdasarkan data pada tabel 3, diketahui bahwa semua variabel *independent* mempunyai nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Sehingga dapat ditarik kesimpulan jika model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk menguji heterokedastisitas menggunakan uji *Glesjer*.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.371	2.571		.533	.595
X1	-.018	.077	-.023	-.238	.813
X2	.012	.086	.015	.142	.887
X3	.025	.072	.036	.350	.727

(Sumber : data diolah, 2022)

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa nilai signifikansi antara variabel bebas dengan *Absolute residual* (ABS) lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Setelah semua uji asumsi klasik dilakukan, selanjutnya dilakukan dengan uji hipotesis. Model regresi berganda bertujuan untuk membantu memecahkan rumusan masalah yang ada, dengan fungsinya untuk melihat adanya pengaruh diantara dua variabel atau lebih. Hasil analisis regresi linear berganda disajikan pada tabel berikut

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (constant)	2.141	4.143		.517	.606
X1	.258	.124	.148	2.077	.040
X2	.886	.138	.489	6.419	.000
X3	.388	.116	.252	3.354	.001

(Sumber : data diolah, 2022)

Regresi variabel dependen dan independent dari tabel 5 menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 2,141 + 0,258.KA + 0,886.PM + 0,116.PTI + e$$

Nilai konstansta 2,141 menunjukkan bahwa apabila variabel independent bernilai konstan, maka rata-rata nilai variabel dependen adalah sebesar 2,141/ koefisien regresi kompetensi aparat pengelola dana desa sebesar 0,258 berarti apabila terdapat penambahan kompetensi aparat pengelola dana desa sebesar 1 satuan, maka pengoptimalan pengelolaan dana desa akan meningkat sebesar 0,258 satuan. Koefisien partisipasi masyarakat sebesar 0,886 berarti bahwa apabila terdapat penambahan partisipasi masyarakat sebesar 1 satuan, maka pengoptimalan pengelolaan dana desa akan meningkat sebesar 0,886 satuan. Koefisien pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,116 berarti apabila terdapat penambahan pemanfaatan teknologi informasi sebesar 1 satuan, maka pengoptimalan pengelolaan dana desa akan meningkat sebesar 0,116 satuan.

Selanjutnya dilakukan uji statistic t, uji hipotesis secara individual (uji t) digunakan untuk melihat apakah terdapat pengaruh secara individual satu variabel independent terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan yang dihasilkan menunjukkan $P < 0,05$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independent berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Paramitha, 2020). Hasil uji t disajikan pada tabel berikut

Tabel 6. Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	2.141	4.143		.517	.606
Total_X1	.258	.124	.148	2.077	.040
Total_X2	.886	.138	.489	6.419	.000
Total_X3	.388	.116	.252	3.354	.001

(Sumber : data diolah, 2022)

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel kompetensi aparat pengelola dana desa sebesar $0,040 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel X_1 mempunyai pengaruh terhadap Y. Dilihat dari nilai t didapatkan juga bahwa t hitung lebih dari t tabel ($2,077 > 1,658$) artinya bahwa variabel X_1 mempunyai pengaruh terhadap Y. nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X_1 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Variabel partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel X_2 mempunyai pengaruh terhadap Y. Dilihat dari nilai t didapatkan juga bahwa t hitung lebih besar dari t tabel ($6,419 > 1,658$) artinya bahwa variabel X_2 mempunyai pengaruh terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa variabel X_2 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Variabel pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa variabel X_3 mempunyai pengaruh terhadap Y. Dilihat dari nilai t didapatkan juga bahwa t hitung lebih dari t tabel ($3,354 > 1,658$) artinya bahwa variabel X_3 mempunyai pengaruh terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X_3 mempunyai hubungan searah dengan Y.

Setelah uji t, dilakukan uji koefisien determinasi R^2 untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variabel-variabel dependen. Apabila *Adjusted R²* semakin mendekati 1, maka semakin besar variasi dalam independent variabel, ini berarti semakin tepat garis regresi untuk mewakili hasil obserbasi yang sebenarnya (Sugiyono, 2014) dalam (Ariyani, 2020). Hasil uji determinasi disajikan dalam tabel berikut

Tabel 7. Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.693 ^a	.480	.466	2.395

(Sumber : data diolah, 2022)

Berdasarkan data pada tabel 7 ditunjukkan bahwa hasil analisis koefisien determinasi dapat terlihat dari *Adjusted R Square* sebesar 0,466. Artinya variasi variabel kompetensi aparat pengelola dana desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi hanya mampu menjelaskan 46,6% variasi variabel pengoptimalan pengelolaan dana desa. Sisanya sebesar 53,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini yang dapat mempengaruhi pengoptimalan pengelolaan dana desa.

Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa terhadap Pengoptimalan Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis 1 (H1) menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng. Nilai signifikansi $0,040 < 0,050$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,077 > 1,658$) sehingga hipotesis yang diajukan diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2020), Umaira & Adnan (2019), Ariyani (2020), Giriani et al. (2021) yang menunjukkan bahwa semakin kompeten aparat pengelola keuangan desa maka pengelolaan dana desa akan semakin optimal dan akuntabel.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *stewardship*, yakni kompetensi aparat desa dilihat dari bagaimana aparat desa (*steward*) dapat menciptakan keputusan serta menentukan Tindakan yang paling tepat untuk tujuan optimalisasi kinerjanya, sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam penggunaan dana desa akan menghasilkan keputusan yang terbaik guna memberikan pelayanan yang sesuai sebagai seorang aparatur desa. Sehingga melalui teori *stewardship* setiap aparatur desa memiliki tujuan yang sama yakni lebih menjunjung tujuan organisasi dibandingkan dengan tujuan perorangan. Sehingga semakin tinggi kompetensi aparatur, maka akan mendukung keberhasilan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kompetensi aparat pengelola dana desa dalam penelitian ini dijelaskan oleh indikator pengetahuan, pelatihan, keahlian teknis, kemampuan mencari solusi, inisiatif dalam bekerja serta keramahan dan kesopanan. Aparat pengelola dana desa mengikuti pelatihan guna meningkatkan kemampuannya dalam mengemban tugas. Pelatihan yang diselenggarakan antara lain bimbingan teknis penyusunan RKP Desa, bimbingan teknis penyusunan rancangan APBDesa dengan aplikasi Siskeudes, serta pembinaan pelatihan kapasitas perangkat desa. Dalam menjalankan tugasnya, aparat desa mampu menemukan solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam bekerja. Serta dalam pelaksanaan tugasnya, aparat desa saling membantu satu sama lain. Hal ini disebabkan karena setiap aparat selalu berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam hal pelayanan, sebagai pelayan publik aparat desa di Kabupaten Buleleng memberikan pelayanan dengan penuh keramahan serta kesopanan.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengoptimalan Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis 2 (H2) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng. Nilai signifikansi $0,000 < 0,050$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,419 > 1,658$) sehingga hipotesis yang diajukan diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alauddin (2020), Pahlawan et al. (2020), Rismawati (2019), Umaira & Adnan (2019), Giriani et al. (2021) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa maka semakin optimal dana desa tersebut dikelola.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *stewardship*, yakni partisipasi masyarakat merupakan salah satu penilaian *principal* pada kinerja dari *agent*. Untuk mewujudkan anggaran yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 pada pasal 54 tentang musyawarah desa. Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Partisipasi masyarakat bisa menjadi salah satu faktor yang menentukan pengoptimalan pengelolaan dana desa, semakin tinggi partisipasi masyarakat maka cenderung semakin optimal dana tersebut dikelola. Hasil pengujian pada penelitian ini berdasarkan pada kuesioner yang disebar kepada 116 responden di pemerintah desa se-Kabupaten Buleleng menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa. Masyarakat dilibatkan dalam berbagai kegiatan, mulai dari menyusun perencanaan dalam pengelolaan dana desa, melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyalurkan ide-ide pokok dalam membangun desa dan membentuk masyarakat berdaya secara ekonomi. Masyarakat dalam terlibat aktif melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), umumnya forum ini melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat untuk merencanakan pembangunan desa.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pengoptimalan Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis 3 (H3) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng. Nilai signifikansi variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar $0,001 < 0,050$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,354 > 1,658$) sehingga hipotesis yang diajukan diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Saputra (2020), Andika & Wati (2021), Sapartiningsih et al. (2018), Karyadi (2018), Rismawati (2019) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa. Semakin bagus pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengelolaan dana desa maka akan semakin akurat, tepat waktu, transparan dan akuntabel pelaporan keuangan desa tersebut dan pertanggungjawaban keuangan desa akan semakin bagus.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam

pengoptimalan pengelolaan dana desa, semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi maka transparansi mengenai keuangan desa juga semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan teori *stewardship*, apabila aparat pengelola dana desa memanfaatkan teknologi dengan maksimal, maka tingkat transparansi pelaporan keuangan dana desa juga semakin tinggi, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat selaku *principal* akan semakin kuat terhadap pemerintah desa selaku *steward*. Dengan memanfaatkan teknologi informasi pemerintah desa akan terbantu dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa serta memudahkan pemerintah melaksanakan kewajibannya sebagai pemberi layanan untuk memenuhi akuntabilitas atau tanggung jawab kepada masyarakat. Pemberian dana desa dalam jumlah besar menuntut tanggung jawab yang besar dari aparatur desa, sehingga pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan efektif. Suatu teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, dan jaringan.

Pada penelitian ini, variabel pemanfaatan teknologi informasi dijelaskan melalui dua indikator utama yakni computer dan jaringan internet, menghasilkan rata-rata jawaban responden tertinggi untuk pemanfaatan jaringan internet. manfaat internet di bidang pemerintahan relative beragam, salah satunya adalah mempermudah system administrasi. System administrasi berbasis internet menyediakan fasilitas pengiriman dan pengelolaan data secara *on line* sehingga memudahkan pengiriman data dan menyeragamkan system antar instansi pemerintah yang meliputi administrasi pelaporan, keuangan, kepegawaian dan lainnya. Pemanfaatan aplikasi Siskeudes juga membantu mempercepat pelaporan dan memudahkan pengawasan oleh pemerintah pusat karena menyediakan informasi *real time*. Jawaban aparat desa yang menyetujui pentingnya ketersediaan jaringan internet membantu penyusunan laporan pertanggungjawaban secara andal dan efisien, pertanggungjawaban dana desa secara administrasi berbantuan perangkat komputer dan didukung jaringan internet meningkatkan kualitas laporan keuangan dan hal ini memudahkan pemangku kepentingan untuk memahami dan membandingkan laporan yang dihasilkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan dapat ditarik disimpulkan sebagai berikut: (1) Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng. (2) Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng. (3) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak diantaranya: (1) Bagi Pemerintah Desa Bagi instansi pemerintah desa diharapkan dapat selalu meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan dana desa dengan memperhatikan dan meningkatkan kompetensi aparat desa serta pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin Agar pemanfaatan teknologi informasi dapat terlaksana dengan efektif, sebaiknya peralatan yang usang atau rusak di data secepat mungkin, sehingga kegiatan pembuatan laporan keuangan tidak terganggu oleh peralatan yang rusak tersebut, maka laporan keuangan pemerintah desa dapat dihasilkan tepat waktu. (2) Bagi Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam program-program pembangunan desa agar tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. (3) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel serta menambah variabel lain guna memperkuat penjelasan faktor yang memengaruhi

pengoptimalan pengelolaan dana desa serta dapat merepresentasikan hasil yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Agustinawati. (2014). *Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba (Studi Atas Ketatanegaraan Islam)*.
- Alauddin, F. C. (2020). *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)*.
- Andika, I. B. A. Y., & Wati, N. W. A. E. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pelaporan, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris di Kecamatan Kerambitan). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 139–151.
- Ariyani, N. P. D. E. (2020). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Efektivitas Kinerja Pendamping Lokal Desa dan Keterlibatan Masyarakat Terhadap Pengoptimalan Pengelolaan Dana Desa*.
- DJPK. (2019). *RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN ANGGARAN 2019 MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA*.
- Fajri, R., Agusti, R., & Julita. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 209. <https://doi.org/10.24014/jiq.v17i2.14463>
- Giriani, M., Dahtiah, N., & Burhany, D. I. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Batujajar. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 480–492.
- Havesi, A. G. (2005). *Standards for Internal Control in New York State Government*. December, 1–30. <https://www.osc.state.ny.us/>
- Karyadi, M. (2018). *PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN , PEMANFATAN TEKNOLOGI INFORMASI , DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA (Studi di Kecamtan Aikmel dan Kecamtan Lenek Tahun 2018)*.
- Mentari Tumbel, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 6(1), 1–21. <https://media.neliti.com/media/publications/161029-ID-partisipasi-masyarakat-dalam-pengelolaan.pdf>
- Najiyati, S., Delam, J., Danarti, Anggraini, R., Priyono, & Ariani, E. (2016). *Dana desa problema dan kontribusi* (cetakan pe). PT. Sulaksana Watinsa Indonesia.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro. (2020). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. 162–172.
- Paramitha, N. P. Y. (2020). *Pengaruh Whistleblowing System, Good Corporate Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam*

Pengelolaan Dana Desa. Universitas Pendidikan Ganesha.

- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi , dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa*. 28, 132–158.
- Rismawati, T. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan. *Universitas Muhammadiyah Magelang*, 4(2), 66.
- Sapartiningsih, D., Suharno, & Kristianto, D. (2018). Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 14(1 Maret), 100–114.
- Saputra, D. (2020). *Pengaruh kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan bantul*.
- Umaira, S., & Adnan. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>